

# **Feminisme Sebagai Gerakan Perjuangan Wanita Pasca Restorasi Meiji**

Indun Roosiani

Universitas Darma Persada

[iroosiani@gmail.com](mailto:iroosiani@gmail.com)

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Restorasi Meiji terhadap gerakan feminisme di Jepang serta bagaimana Gerakan ini mampu mengubah kehidupan sosial dan kedudukan kaum Wanita Jepang. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif, yakni dengan teknik mengumpulkan data-data kepustakaan yang akan dicari masing-masing variabelnya. Dari data-data yang sudah ditemukan variabelnya tersebut maka akan dicari relevansinya. Perubahan di bidang kesetaraan antara pria dan wanita pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Akan tetapi perubahan yang dilakukan tidak menyentuh pada substansi yang diharapkan, dengan kata lain masih banyak terjadi ketimpangan peran antara pria dan wanita. Hal ini diakibatkan karena pengaruh rezim Tokugawa yang masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Jepang, sehingga bukan hal yang mudah untuk mendapatkan kesetaraan dan hak yang sama dengan kaum pria. Pemerintah menganggap bahwa partisipasi wanita dalam perubahan sosial di seluruh negeri secara esensial sebagai hal yang negatif, karena beberapa aksi yang dilakukan secara tidak sengaja berkontribusi memicu perdebatan terhadap status wanita Jepang. Pada tahun 1874 perdebatan yang mengangkat isu wanita Jepang semakin mengemuka dan banyak diangkat di majalah maupun surat kabar Jepang. Prinsip ‘peradaban dan pencerahan’ yang dilontarkan oleh barat dijadikan landasan oleh sebagian besar pemikir Meiji untuk mempertahankan bangsa Jepang terhadap superioritas barat. Isu feminisme yang menuntut adanya kesetaraan kedudukan antara pria dan wanita di Jepang mulai mendapat tempat seiring dengan peristiwa Restorasi Meiji, dimana pada masa ini peluang wanita untuk mengenyam pendidikan terbuka lebar meskipun hanya sebagian lapisan saja yang mendapat kesempatan bersekolah.

Kata kunci: Restorasi Meiji, kesetaraan, feminisme, perubahan

## **I. PENDAHULUAN**

Restorasi Meiji yang terjadi pada tahun 1868 merupakan babak baru bagi masyarakat dan pemerintahan Jepang. Setelah lebih kurang 250 tahun Jepang melakukan politik menutup diri (isolasi) terhadap negara luar, maka setelah terjadinya Restorasi Meiji pemerintah melakukan perubahan besar di berbagai bidang, meliputi bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Perubahan di bidang kesetaraan antara pria dan wanita pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Akan tetapi perubahan yang dilakukan tidak menyentuh pada substansi yang diharapkan, dengan kata lain masih banyak terjadi ketimpangan peran antara pria dan wanita. Hal ini diakibatkan karena pengaruh rezim Tokugawa yang masih sangat melekat dalam

kehidupan masyarakat Jepang, sehingga bukan hal yang mudah untuk mendapatkan kesetaraan dan hak yang sama dengan kaum pria.

Adalah Mori Arinori, Nakamura Masanao dan Fukuzawa Yukichi, tiga anggota dalam Meirokusha yang banyak memberikan kontribusi tulisan dalam Jurnal Meirokusha. Meirokusha adalah wadah bagi para intelektual muda yang ingin mengembangkan gagasan, ide atau pemikiran demi kemajuan Jepang, khususnya wanita. Mori Arinori dan Nakamura Masanao banyak dipengaruhi oleh agama Kristen dan Fukuzawa Yukichi sering mengkritik pemikiran irasional masyarakat Jepang. Mereka sepakat dengan pemikiran bahwa selama ini wanita Jepang mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan cenderung 'barbaric'. Jika masyarakat Jepang ingin merubah kehidupannya, maka harus melakukan reformasi yang nyata, dan ini harus dimulai dari dalam keluarga serta wanita menjadi titik sentral perubahannya (Sievers, 1983:18).

Kondisi yang melemahkan kedudukan wanita turut memicu beberapa kalangan intelektual wanita untuk menyuarakan aspirasi mereka melawan ketidakadilan yang menimpa kaum wanita. Kelompok ini memperjuangkan isu feminisme yang menuntut adanya kesetaraan kedudukan antara pria dan wanita. Feminisme di Jepang mulai mendapat tempat seiring dengan peristiwa Restorasi Meiji, dimana pada masa ini peluang wanita untuk mengenyam pendidikan terbuka lebar meskipun hanya sebagian lapisan saja yang mendapat kesempatan bersekolah.

Gerakan feminisme Jepang dimulai dipelopori oleh 2 orang wanita modern, yakni Hiratsuka Raichou dan Fukuda Hideko. Raichou mendirikan majalah *Seito*, sedangkan Hideko mendirikan majalah *Sekai Fujin*. Kedua majalah tersebut bertujuan untuk mengangkat kesadaran wanita, atas perlakuan yang selama ini mereka alami. Baik Raichou maupun Hideko berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Raichou berasal dari keluarga yang berada dan sejahtera, sementara Hideko memiliki latar belakang keluarga yang miskin, dimana kedua orang tuanya bekerja di *Terakoya* (sekolah kuil).

Pemikiran Fukuda Hideko dipengaruhi oleh Kishida Toshiko yang terkesan atas pidatonya yang mengadvokasi persamaan hak antara pria dan wanita dan mendorong agar dibentuk organisasi untuk memperkuat solidaritas perempuan. Hideko terkenal sebagai wanita yang sangat aktif, namun kadang-kadang aksinya tanpa diikuti pemikiran yang matang. Hideko sudah mulai bekerja sejak usia 15 tahun. Pemikirannya mengacu bahwa kemandirian menjadi hal yang penting untuk mencapai kebebasan perempuan. Dia meyakini bahwa pendidikan merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan wanita dari penderitaan. Sementara itu, Hiratsuka Raichou terkenal sebagai feminis yang berjuang melalui tulisan,

diamana pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Ikuta Choukou yang juga mendorongnya untuk mempublikasikan majalah sebagai media wanita Jepang. Tekadnya ini kemudian didukung oleh Yasumochi Yasuko.

Baik Raichou maupun Hideko, keduanya secara konsisten menolak konsep “*patriarchal family system*” yang mereka anggap sebagai faktor terbesar yang menyebabkan wanita Jepang berada dalam status yang rendah, meskipun Jepang sudah memasuki jaman modern. Selain itu mereka juga menentang konsep ajaran Konfusianisme yang mengajarkan perkawinan konvensional. Wanita tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jodohnya sendiri dan perkawinan dilakukan dengan cara paksa, mengikuti perintah ayahnya. Pada kenyataannya, gerakan feminisme sebelum Perang Dunia II memiliki karakteristik perlawanan yang konsisten terhadap nilai-nilai moral masyarakat yang mengikat kebebasan wanita dalam waktu yang lama.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan menggunakan teori feminisme. Moore (1998:23) menyatakan bahwa feminisme mengacu pada kesadaran wanita akan penindasan dan pemerasan dalam kerja di rumah, dan di masyarakat serta dapat juga diartikan sebagai kesadaran tindakan politik yang dilakukan oleh wanita untuk mengubah situasi ini.

Lebih lanjut Sherry Ortner (1974:30-31, dalam Moore) menyatakan bahwa subordinasi wanita merupakan sesuatu yang universal, dan karena keadaan ini bukan sesuatu yang dibawa (*inherent*) dalam perbedaan biologis antara pria dan wanita. Ortner berpendapat bahwa wanita diidentifikasi atau secara simbolik diasosiasikan dengan alam, sedangkan pria diasosiasikan dengan kebudayaan. Oleh karena kebudayaan berusaha untuk mengontrol dan menguasai alam, maka merupakan sesuatu hal yang ‘alami’ bahwa wanita, karena hubungannya dekat dengan ‘alam’ juga harus dikontrol dan dikuasai.

Teori Ortner tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat dan budaya Jepang, dimana selama kurun waktu dua abad lebih kedudukan wanita berada di bawah pria. Dominasi pria atas wanita diperkuat oleh ajaran Konfusianisme yang mengharuskan adanya ketaatan wanita terhadap pria. Ortner memulainya dengan gagasan bahwa perbedaan biologis antara pria dan wanita hanya akan berarti (*signifikan*) dalam sistem nilai yang diberi makna tertentu secara kultural, yang menempatkan ketidaksetaraan seksual pada tingkat ideologis dan simbol kebudayaan.

## **II. METODELOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan proses yang digunakan pelaku suatu disiplin ilmu. Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan

adalah metodologi kualitatif, yakni dengan teknik mengumpulkan data-data kepustakaan yang akan dicari masing-masing variabelnya. Dari data-data yang sudah ditemukan variabelnya tersebut maka akan dicari relevansinya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Status Wanita Jepang

Kedudukan perempuan sebelum perang berada jauh di bawah laki-laki. Perempuan tidak diberi kesempatan untuk sejajar dengan laki-laki. Terutama dalam masalah perkawinan, tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Dalam keluarga petani, hal terpenting bagi seorang laki-laki yang hendak menikah adalah ketrampilan dan kesanggupannya dalam mengatur istri untuk mau bekerja keras di ladang.

Sebelum perang, perkawinan bukanlah merupakan permulaan keluarga baru, tapi lebih merupakan masuknya anggota baru ke dalam keluarga suami. Secara tradisional, keluarga tani Jepang berdasarkan prinsip bahwa keluarga baru yang akan mewarisi ladang kelak, hidup bersama di bawah satu atap dengan generasi yang lebih tua, orang tua suami serta kakek dan neneknya dari pihak ayahnya (Fukutake, 1989:31). Pernikahan di Jepang memiliki tiga fungsi. Pertama, dari sudut pandang rumah tangga pernikahan merupakan cara untuk menarik anggota baru dalam rumah tangga. Seorang pengantin perempuan diharapkan akan mengisi posisi sebagai *shufu* (nyonya rumah) dan pengantin laki-laki sebagai *shujin* (tuan rumah). Kedua, dari sudut pandang struktur “pohon keluarga” pengantin perempuan dan pengantin laki-laki diperlukan bagi penerus garis keturunan. Kedudukan istri akan terancam apabila ia belum juga melahirkan seorang anak. Fungsi ketiga, adalah penyatuan dua keluarga dari kedua belah pihak. Pernikahan menyatukan dua *ie* untuk membentuk *shinseki* yang saling menguntungkan keduanya. (Lebra, 1990:28).

Keluarga lebih dari sekedar anggotanya. Kata “*ie*” menerangkan hakikat bahwa keluarga sebagai satu entitas yang berlangsung terus dan dilestarikan melalui garis bapak dari generasi ke generasi (patrilineal) (Fukutake, 1989:31).

Selama berabad-abad kehidupan perempuan elit (terutama samurai) diatur oleh etika Konfusianisme (di mana kehidupan perempuan terikat oleh tiga ketaatan, yakni: ketaatan kepada ayahnya ketika ia masih muda, ketaatan kepada suami ketika ia sudah menikah, dan ketaatan kepada anak laki-lakinya ketika ia sudah tua), dan tunduk pada banyak kendala lainnya.

Pengaruh ajaran Konfusianisme dari Cina menempatkan perempuan pada kedudukan yang rendah, diskriminasi antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakar kuat dalam

kehidupan masyarakat Jepang dirasakan sangat kuat pada jaman feodal atau sebelum Restorasi Meiji. Meskipun setelah Perang Dunia II ditetapkan Undang-Undang baru yang secara tegas tidak membenarkan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, namun kenyataannya hukum ini berjalan sangat lamban.

### 3.2 Kedudukan dan Peran Wanita Jepang Pasca Meiji

Selama periode Meiji, industrialisasi dan urbanisasi mengurangi otoritas ayah dan suami, namun pada saat yang sama justru Kode Sipil Meiji tahun 1898 melegalkan penolakan hak hukum perempuan dan menundukkan mereka atas kehendak kepala rumah tangga.

Seperti halnya negara-negara lain, secara hukum wanita Jepang mendapatkan perlindungan yang cukup dengan pernyataan yang positif tentang persamaan pria dan wanita. Namun pada kenyataannya terdapat jurang yang cukup besar antara apa yang tertulis dengan kenyataan. Sampai dengan tahun 1948 seorang wanita menurut Undang-Undang harus tunduk kepada ayahnya, bila sudah menikah kepada suaminya dan pada masa tuanya tunduk kepada anak laki-laknya. Selain itu, dalam Undang-Undang juga tercantum bahwa pernikahan akan memperoleh legalitas dalam pencatatan, namun pada kenyataannya masih banyak pernikahan yang dilakukan secara adat/agama yang secara sosial telah dianggap sah. Selama rentang waktu pernikahan, pencatatan resmi bahwa wanita telah menjadi seorang istri tidak ada. Baru setelah istri mampu melahirkan anak statusnya sebagai seorang istri dianggap sah.

Pemerintah Meiji menjadikan rumah tangga dalam keluarga Jepang sebagai sarana penting yang memainkan peranan perempuan. Perempuan dalam keluarga Jepang diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung kekuatan industri Jepang. Pemerintah Meiji menganjurkan kepada setiap perempuan agar berusaha mengelola perekonomian keluarga dengan cara menabung untuk investasi negara dan berupaya melakukan upaya penghematan.

Salah satu slogan pemikiran barat yang menandai jaman Meiji adalah “Pencerahan, persamaan gender dan sistem monogami”. Pemikiran yang menghormati kebebasan manusia dan hak-hak manusia diperkenalkan oleh Amerika dan negara-negara Eropa lainnya, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Pencerahan.

Adalah Fukuzawa Yukichi (1835-1901), tokoh pendidikan pertama yang menyerukan mengenai kedudukan perempuan Jepang di dalam masyarakat. Fukuzawa adalah tokoh pergerakan Jepang yang mengadvokasi pemerintah agar perempuan Jepang diberikan hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. Tidak lama kemudian Pemerintah Meiji memulai membuka kesempatan pendidikan yang sama baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pemerintah kala itu berpendapat bahwa pendidikan sangat dibutuhkan untuk menyongsong era perubahan menuju industri modern. Setelah pemerintah mengumumkan secara resmi

Undang-Undang Pendidikan pada tahun 1872, maka lebih dari 20.000 sekolah dasar dibuka, sehingga rata-rata 56% anak laki-laki dan 23% anak perempuan sudah memasuki pendidikan dasar. Namun pendidikan bagi perempuan Jepang yang dicanangkan oleh pemerintah Jepang berdasarkan pada prinsip *Ryousai Kenbo* (istri yang baik dan ibu yang bijaksana). Prinsip ini menjadi nilai esensial bagi perempuan Jepang hingga akhir Perang Dunia II. Pendidikan untuk istri yang baik dan ibu yang bijaksana menanamkan pemikiran bahwa mereka harus menghormati dan mencintai negara Jepang seperti layaknya mereka mencintai keluarga, dan berusaha memberikan yang terbaik, meskipun sistem keluarga patriarkal masih berlaku dan perempuan tetap menempati posisi rendah dibandingkan laki-laki.

#### Pengaruh Restorasi Meiji Terhadap Kemunculan Feminisme

Setelah Jepang memantapkan diri sebagai negara “modern” pada paruh terakhir abad ke-19, maka dilakukan serangkaian pembinaan bangsa dalam segala aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya yang lebih dikenal dengan sebutan *Bunmei Kaika*. Dengan kebijakan ini, rejim Meiji mengambil pemikiran barat, diantaranya adalah penghapusan diskriminasi kelas. Dampak *bunmei kaika* melahirkan beberapa tokoh intelektual diantaranya adalah Mori Arinori dan Fukuzawa Yukichi, yang diikuti oleh tokoh-tokoh wanita diantaranya adalah Tsuda Umeko, Fukuda Hideko, Hiratsuka Raichou, Kishida Toshiko dll. Para intelektual wanita ini tergerak hatinya untuk memperjuangkan wanita Jepang yang selama ini tertindas hak-haknya sebagai manusia. Pada awalnya mereka berjuang secara individual yang belum terikat antara satu dengan yang lain. Namun gerakan ini terus mengalami kematangan hingga pada akhirnya tumbuh kesadaran dalam diri mereka untuk berjuang secara berkelompok hingga terbentuk organisasi-organisasi yang berjuang demi perbaikan hidup dan persamaan hak dengan pria.

#### 3.3 Feminisme Sebagai Gerakan Perjuangan Wanita Jepang

Istilah Feminisme (*feminizumu*) masuk ke Jepang tahun 1920, untuk menyatakan perjuangan hak-hak perempuan. Menurut Ehara Yumiko, istilah feminisme di Jepang berarti teori pembebasan perempuan atau teori yang mencari solusi bagi masalah perempuan. Menurut Yamakawa Kikue, feminis hanya mengacu pada aktivitas perempuan kelas menengah ke atas, sedangkan menurut Hiratsuka Raicho, feminisme di Jepang terdiri dari aktivis (*katsudouka*), kritikus (*hyoronka*), pemimpin (*josei ri-da-*), pemikir (*shisouka*) dan intelektual perempuan (*josei chisikijin*).

Gerakan feminisme di Jepang juga diawali dengan munculnya tokoh yang bernama Hiratsuka Raichou yang mempublikasikan majalah sastra *Seito* (Bluestocking) pada bulan September tahun 1911. Melalui majalahnya Raichou mencoba mengangkat isu-isu tentang

wanita abad 19 dan memberikan kesadaran bahwa masalah perjuangan wanita Jepang merupakan masalah bersama. Raichou menyatakan bahwa kesadaran ini harus diperjuangkan terutama perlawanan terhadap hal-hal yang tidak rasional, yang sudah tidak sesuai dengan kondisi wanita jaman modern. Wanita yang memiliki potensi, bakat dan keahlian harus “keluar” memperjuangkan nasibnya (Sievers, 1983:163)

Dapat dikatakan bahwa Raichou menjadi salah satu model pegiat feminisme Jepang pasca Meiji yang menyoroti dan melawan ketidakadilan yang menimpa kaum wanita Jepang, sebagai akibat pengaruh feodalisme yang telah berakar kuat dalam masyarakat Jepang. Raichou secara tegas menolak konsep *'patriarchal family system'* yang dianggapnya sebagai faktor penghalang terbesar yang menjadikan wanita Jepang berada dalam status yang rendah. Selain itu, Raichou juga menentang ajaran Konfusianisme yang mengharuskan wanita Jepang mengikuti perkawinan konvensional, yakni tunduk dan patuh terhadap pilihan jodoh dari orang tuanya. Dalam sistem perkawinan ini keinginan wanita tidak diperdulikan. Pada kenyataannya gerakan wanita Jepang sebelum Perang Dunia II memiliki karakteristik perlawanan terhadap nilai-nilai moral yang mengikat kebebasan wanita.

Baik Raichou maupun Hideko keduanya memiliki titik tolak yang berbeda dalam perjuangannya. Raichou menekankan pada kemandirian ekonomi, sedangkan Hideko menekankan pada kemandirian spiritual, kebebasan yang nyata sebagai seorang wanita dan menunjukkan diri sebagai wanita yang bertalenta. Hideko mengatakan bahwa wanita yang miskin akan diperbudak oleh kekayaan dan laki-laki. Kebebasan wanita adalah bebas dari 2 jenis perbudakan, yakni perbudakan dari kemiskinan dan perbudakan dari laki-laki, sehingga dalam hal ini terdapat double emansipasi. Masalah ini dituangkan dalam karya tulisan yang dipublikasikan dalam majalah *seitou* yang berjudul "The Solution Women Problem" dan "*Fujin Kaihou ni Tsuite*" (on women liberation) yang diterbitkan dalam *sekai fujin* (Horimoto, 1999:109). Oleh karena itu cinta, sex dan perkawinan menjadi tema terbesar dalam majalah *seitou*.

#### 3.4 Kedudukan Wanita Pasca Gerakan Feminisme di Jepang

Dengan adanya gerakan feminisme, maka lambat laun kehidupan masyarakat Jepang khususnya wanita mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi meliputi dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, pekerjaan, pendidikan dan sosial-politik. Beberapa perubahan tersebut belum dapat dikatakan mencapai taraf yang diinginkan, namun perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi wanita Jepang terus dilakukan.

### 3.5 Dampak Dari Gerakan Feminisme

*Seitou* membawa dampak yang lebih besar terhadap masyarakat daripada sekai fujin. Wanita-wanita dalam grup *seitou* juga memberikan pengaruh dalam bidang jurnalisme. Sementara itu, majalah lain yakni *Chuo Koron* dipublikasikan untuk mengangkat gambaran tentang “masalah wanita” pada musim gugur tahun 1913. Terinspirasi oleh kesuksesan *Chuo Koron*, maka diterbitkan pula *Fujin Koron* pada tahun 1916, sebuah majalah yang memfokuskan pada problem wanita. Orang-orang yang terlibat dalam penulisan dalam berasal dari berbagai kalangan, baik profesor maupun ilmuwan. Artikel dalam *fujin koron* membahas seputar isu-isu wanita, termasuk cinta, perkawinan, kehidupan keluarga, profesi wanita, kontrasepsi, persamaan pendidikan dan hak pilih wanita (Horimoto, 1999:110).

Sementara itu, globalisasi ekonomi telah menimbulkan efek eksploitasi ekonomi, terutama yang terjadi di negara-negara berkembang memberikan dampak pada perubahan sosial, politik, ekologi dan budaya. Bangkitnya perusahaan multinasional dan program restrukturisasinya telah disesuaikan dengan persyaratan pasar internasional. Sampai saat ini, perkembangan ini telah menyebabkan peningkatan kemiskinan, terutama memberikan pengaruh pada kedudukan wanita. Pada saat yang sama globalisasi menunjukkan perluasan terhadap jaringan teknologi dan stuktur komunikasi di seluruh wilayah nasional dan internasional, sehingga hal ini turut menyuarakan gerakan perjuangan wanita termasuk di Jepang, seperti pengiriman wanita muda ke Amerika Serikat dan Eropa yang menyertai misi Iwamura, dibentuknya Masyarakat Reformasi Moral Jepang (*Tokyo Fujin Kyoufukai*), gerakan anti pelacuran dan gerakan hak pilih sejak periode Meiji (1868-1912).

Masalah internasional yang telah memasuki agenda sosial politik sejak tahun 1980 an turut dirasakan dampaknya bagi negara Jepang, terutama pada dekade tahun 1990 an. Atas issue inilah, maka masalah feminisme juga turut bereaksi dengan melihat peluang dalam aspek internasionalisasi. Seorang peneliti sejarah Jepang, Hiroko Tomida mengatakan bahwa feminisme di Jepang masih terbatas pada masalah-masalah nasional dan lokal, sebuah kekurangan bila dibandingkan dengan negara-negara barat.

Sebenarnya, pada awal 1900-an, feminisme Amerika dan Jepang saling mengilhami. Seorang advokat pengendalian kelahiran di Jepang, Kato Shidzue, telah bekerja sama dengan aktivis pengendalian kelahiran Amerika yakni Margaret Sanger. Shidzue membawa Sanger ke Jepang pada tahun 1922 untuk berbicara mengenai topik ini (Kuo, 2015). Asosiasi Wanita Baru (NWA) pada awal 1900-an mendorong lebih banyak hak, termasuk revisi undang-undang perzinahan yang memungkinkan wanita mengajukan perceraian jika dia mengetahui

bahwa suaminya atau tunangannya memiliki penyakit kelamin. Asosiasi tersebut membingkai argumen mereka untuk melindungi peran keluarga perempuan - memungkinkan perempuan menjadi istri yang lebih baik dan ibu yang lebih bijak melalui peningkatan kesadaran politik. Mereka tidak berusaha untuk benar-benar melepaskan diri dari *ryosai kenbo* (ibu yang baik dan istri yang bijaksana). Sebagian besar pendukung berfokus pada peningkatan kehidupan perempuan melalui kesehatan yang lebih baik, penghapusan kemiskinan, kondisi kerja yang lebih baik, perlindungan terhadap ibu, dan tujuan lain yang serupa, bukan tujuan politik. Pembebasan politik dipandang sebagai jalan menuju tujuan ini (Kincaid (2017), dalam Molony, 2000).

Dalam sebuah artikel tahun 1920, Ichikawa Fusae, pemimpin NWA, menulis:

*Aren't we treated completely as feeble-minded children? Why is it all right to know about science and literature and not all right to be familiar with politics and current events? Why is it acceptable to read and write but not speak and listen? A man, no matter what his occupation or educational background, has political rights, but a woman, no matter how qualified, does not have the same rights...If we do not understand the politics of the country we live in, we will not be able to understand conditions in our present society (Kincaid,2017:7)*

Fusae mendorong hak-hak absolut dan bukan hak perempuan berdasarkan pendidikan atau peran ibu, yang meletakkan dasar bagi aktivitas feminisme setelah Perang Dunia II. Berbicara tentang Perang Dunia II, slogan istri yang baik dan peran ibu yang bijaksana terus berlanjut sampai sekarang. Peran sebagai ibu rumah tangga tetap dihargai tinggi, namun mereka membiarkan sedikit ruang untuk pengembangan diri dan keseimbangan keluarga - kerja.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Restorasi Meiji sebagai babak baru kehidupan bangsa Jepang telah membuka peluang adanya interaksi dengan bangsa barat, sehingga pola hidup dan pemikiran bangsa barat turut memberikan pengaruh bagi masyarakat Jepang.
2. Adanya hubungan dengan bangsa barat memberikan kesempatan kepada sebagian masyarakat Jepang untuk menyerap ilmu pengetahuan dan pola kesetaraan antara pria dan wanita, yang lebih dikenal dengan feminisme. Gerakan feminisme yang menghasilkan beberapa aturan hukum dan perundang-undangan memberikan sedikit

perlindungan terhadap kaum wanita Jepang, meskipun belum dilaksanakan dengan seutuhnya.

3. Kemajuan feminisme yang terus-menerus disuarakan oleh pegiat feminisme dan tokoh-tokoh intelektual lainnya menjadikan wanita Jepang memperoleh kesempatan pendidikan yang sama dengan kaum pria, memiliki hak pilih dan ada beberapa wanita Jepang berhasil menduduki kursi parlemen, meskipun dengan jumlah yang belum seimbang dengan kaum pria.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Buckley Sandra.(1997). *Broken Silence, Voice of Japanese Feminism*. London: University of California Press
- Fukutake Tadashi,1989,*Masyarakat Pedesaan di Jepang*.(Lukman Sutrisno, Pengantar) Jakarta: PT.Gramedia.
- Fumiko Horimoto. (1999). *Pioneers of The Women's Movement in Japan: Hiratsuka Raichou and Fukuda Hideko Seen Through Their Journals, Seito and Sekai Fujin*. University of Toronto: Departement of East Asian Studies
- Gremer Andrea.(2003). *Feminist History in Japan and International Perspectives*
- Komori Naoko,Dr. (2006). *The 'Hidden'History of Accounting in Japan: An Historical Examination of the Relationship between Japanese Women and Accounting*. The University of Manchester: Center for the Analysis of Investment Risk, Manchester Business School
- Kiguchi Junko.( ). *Japanese Women's Right at The Meiji Era*.
- Kincaid Chris. (2017). *A Look At Japanese Feminism and Japanese Misogyny*.  
[www.japanpowered.com/japan-culture/a-look-at-japanese-feminism-and-japanese-misogyny](http://www.japanpowered.com/japan-culture/a-look-at-japanese-feminism-and-japanese-misogyny)
- Lebra, Takie Sugiyama,1984, *Japanese Women,Constraint And Fulfillment*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Okamura Osamu. (1983). *Peranan Wanita Jepang*.Yayasan Obor Indonesia: Gadjah Mada University Press.
- Iwao Sumiko.(1993). *Japanese Women:Traditional Image and Changing Reality*. New York: The Free Press
- Moore, L Henrietta. (1998). *Feminisme dan Antropologi*. Jakarta: Penerbit Obor
- Mowry Robins. (1983). *The Hidden Sun, Women of Modern Japan*. Colorado: Westview Press

- Sievers Sharon L.(1983). *Flower in Salt, The Beginnings of Feminist Consciousness in Modern Japan*. Calofornia: Stanford University Press
- Suryana, Prof. Dr, M.Si. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Lebra, Takie Sugiyama (1985). *Japanese women : constraint and fulfillment*. Honolulu, HI: University of Hawaii Press
- Yoshiaki Yoshimi,1995, *Comfort Women. Sexual Slavery in The Japanese Military During World War II*.Trans by Suzanne O'Brien. New York: Columbia University Press.
- Wulandari Endah (2003). *Gerakan Feminisme: Studi Tentang Gerakan Protest Ketidakadilan Terhadap Perempuan Pada Awal Jaman Modern*. Wacana Vol V No. 1